LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun Anggaran 2020

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2021

https://dinkes.semarangkota.go.id/

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Gambaran Umum Organisasi 4
D. Permasalahan Utama 4
E. Struktur Organisasi 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 15
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Th 2020 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 27
C. Akuntabilitas Keuangan 49

BAB IV PENUTUP 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemapuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2002 pasal 28 H dan pasal 34 serta Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang masuk dalam urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan didukung oleh letak Kota Semarang sebagai jalur utama diantara kota – kota besar di pulau Jawa, membuat Kota Semarang rawan terhadap penyakit yang dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat serta tidak mengenal batas wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ”*New emerging diseases*” ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali beberapa penyakit yang selama ini sudah berhasil dikendalikan ”*re – emerging diseases*”.

Amanat pelaksanaan pembangunan kesehatan dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional (NAWACITA), dimana pembangunan kesehatan itu masuk dalam point “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Sedangkan pembangunan kesehatan di Kota Semarang, dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk mendukung misi Walikota Semarang yaitu misi pertama : **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), penyusunan LKj-IP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki acuan pembangunan kesehatan konsep paradigma Semarang Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan / pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Semarang.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang pedoman teknis pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah OPD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akrrrasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LKj-IP dapat digunakan sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan,permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj-IP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Diharapkan dengan LKj-IP ini pemerintah daerah mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masa pandemic Covid-19 memiliki kontribusi atas ketidaktercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk atau keluar provinsi, kabupaten atau kota tertentu, serta adanya recofusing anggaran. Beberapa permasalahan terkait pencapaian kinerja adalah

1. Permasalahan Program KIA
    a. Pelaksana sistem rujukan kurang optimal;
    b. Keterbatasan ruang isolasi di RS untuk bumil terkonfirmasi covid;

c. Kebutuhan sarpras Puskesmas terkait kegawatan maternal neonatal belum maksimal;
d. Komunikasi dan koordinasi antar Jejaring fasyankes kurang optimal;
e. Pemanfaatan anggaran jampersal belum sesuai sasaran (kendala kewilayahan);
f. Screning faktor risiko atau komplikasi bumil,bumil,bufas dan bayi baru lahir kurang optimal dikarenakan adanya pandemi covid;
g. Analisa hasil pemeriksaan ibu hamil belum optimal sehingga berdampak pada kelangsungan hidup bayi;
h. Penanganan kegawatandaruratan meternal dan neonatal belum sesuai standar;
i. Pelayanan kesehatan bayi dan balita kurang optimal pada masa pandemi dikarenakan pelayanan Posyandu tidak aktif dan kunjungan ke Puskesmas menurun

2. Permasalahan terkait pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
   a. Permasalahan pelayanan kesehatan lansia pada tahun 2020 adalah
      1) Jumlah kunjungan lansia di pelayanan kesehatan 136.457 lansia
      2) Jumlah posyandu lansia yang aktif hanya 46,71%
   b. Permasalahan terkait pelayanan kesehatan hipertensi adalah
      1) Target prevalensi hipertensi berdasarkan estimasi riskesdas 2018 sangat tinggi dan tidak berdasarkan data riil;
      2) FKTP puskesmas belum maksimal sebagai fungsi UKM (upaya Kesehatan masyarakat);
      3) Pemberdayaan masyarakat melalui posbindu bekum berjalan maksimal diantaranya karena ada pandemi Covid-19;
      4) Pada awal pandemic covid 19 ada edaran terkait program yang bersifat mengumpulkan masa seperti posbindu agar ditunda pelaksanaannya.
   c. Permasalahan terkait pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis adalah Jumlah kunjungan pasien disemua faskes turun, kegiatan screening dari rumah ke rumah tidak bisa berjalan optimal karena pandemic covid, Jumlah tenaga penjangkau juga berkurang. Kondisi ini dialami juga oleh

Kab/Kota lain di Jawa Tengah. Kemungkinan dampak positif dari kebiasaan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

d. Permasalahan terkait pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV adalah kegiatan VCT mobile tidak bisa dilaksanakan karena banyak tempat hiburan yang tutup, dan juga populasi kunci utama yang mahasiswa tidak tinggal atau kos lagi di Semarang.

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut;

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tangungjawab;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;

h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 ditetapkan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Semarang yang dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Semarang No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dengan struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
    2.1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2.2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
    3.1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    3.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
    3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
    4.1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
    4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan

4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
   5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
   5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
   5.3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
   6.1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
   6.2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
   6.3. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.
7. UPTD, terdiri atas :
   7.1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
   7.2. UPTD Instalasi Farmasi; dan
   7.3. UPTD Laboratorium Kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mencapaian kerja yang optimal maka OPD Dinas Kesehatan Kota Semarang ini dilengkapi dengan 39 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), yang terdiri dari satu unit Instalasi Farmasi, satu unit Laboratorium Kesehatan dan 37 unit Puskesmas.

2. Struktur Organisasi

Gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang sesuai Perwal Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

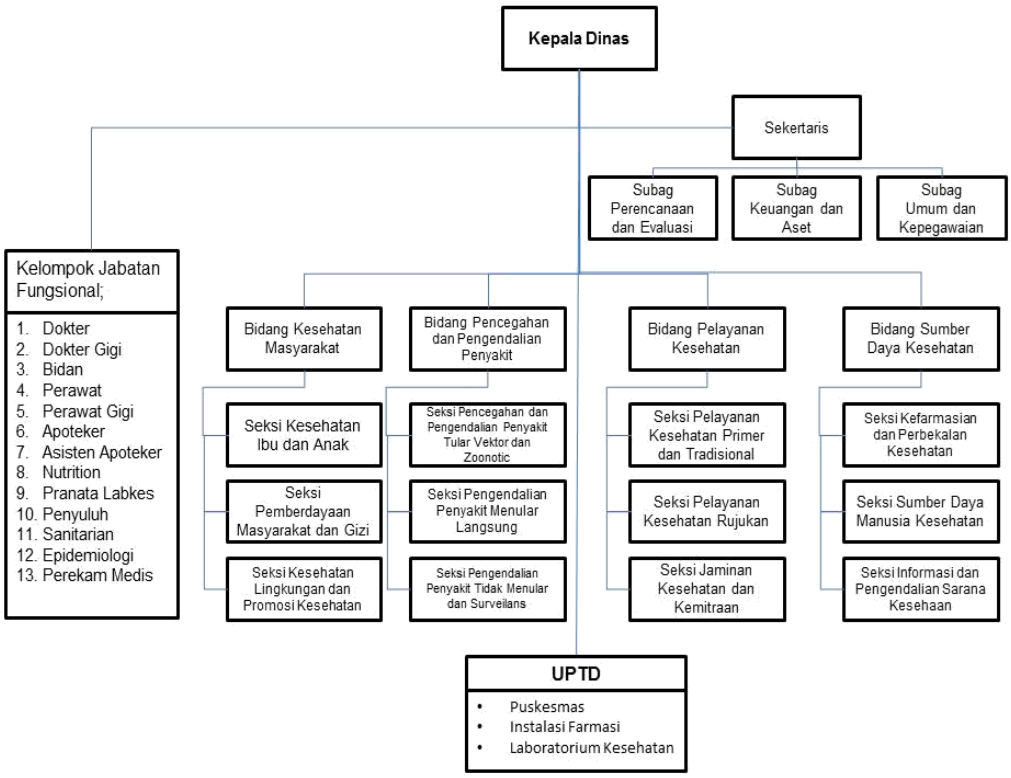

3. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi diatas, Dinas Kesehatan Kota Semarang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dengan status ASN sebanyak 1176 orang dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan, sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 berikut;

Tabel 1.1
Rekapitulasi Tenaga ASN Dinas Kesehatan Kota Semarang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja /Puskesmas	Tingkat Pendidikan								Total
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1.	DKK	33	37		10	1	21	2		104
2.	Ins. Farmasi	1	3		2		2			8
3.	Lab. Kesehatan	1	4		6		2			13
4.	Poncol	1	10	1	13	1	3			29
5.	Miroto		10		12		3			25
6.	Bandarharjo	1	8	2	11	1	4			27

No	Unit Kerja /Puskesmas	Tingkat Pendidikan								Total
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
7.	Bululor	2	11	1	9		2		1	26
8.	Halmahera	1	10	4	14		2	1	1	33
9.	Bugangan	1	8	1	13		3	1		27
10.	Karangdoro		10	1	14		1			26
11.	Pandanaran	2	11	1	12		4	3		33
12.	Lamper Tengah		10	1	9	1	2			23
13.	Karangayu		8	3	8	1	3			23
14.	Lebdosari		10	1	15	1	3			30
15.	Manyaran	2	8	1	12		2			25
16.	Krobokan	1	10		9		1	1		22
17.	Ngemplak Simongan		8	1	8	1	1	1		20
18.	Gayamsari		10	4	11		1	1		27
19.	Candilama		7	1	11	1	4			24
20.	Kagok	2	9	2	10		1			24
21.	Pegandan	2	10	3	10		1	1		27
22.	Genuk	1	8	2	9	1	4			25
23.	Bangetayu		12	1	17		6			36
24.	Tlogosari Wetan	1	9	2	13		4		1	30
25.	Tlogosari Kulon		14	1	15	2	1	3		36
26.	Kedungmundu		11	2	17		2	1		33
27.	Rowosari			13	14		3			30
28.	Ngesrep	1	9	3	15	1	4			33
29.	Srondol		17	1	11	1	4	1		33
30.	Padangsari		9	2	11		3	1		26
31.	Pudakpayung		12	1	10				1	24
32.	Gunungpati	1	10	3	19		5	1		39
33.	Sekaran	1	7	1	10		2			21
34.	Mijen	2	12	1	17		4	1	2	39
35.	Karangmalang		9	1	16		1		1	28
36.	Tambakaji	1	8		10		2		1	22
37.	Purwoyoso		10	1	10		3			24
38.	Ngaliyan	1	14	1	14		4	2		36
39.	Mangkang		11		18		6		1	36
40.	Karanganyar		5		14		3		1	23

Sumber : Data Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia (SDM) dilingkup Dinas Kesehatan Kota Semarang yang berstatus ASN adalah tenaga dengan tingkat pendidikan D III dan S1. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2015. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan

sumber daya manusai. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki 37 UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang tersebar dalam 16 kecamatan. Ketersediaan SDM puskesmas merupakan salah satu persyaratan dalam pendirian puskesmas. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan standar ketenagaan puskesmas terdiri atas tenaga Kesehatan yang meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik. untuk tenaga non Kesehatan terdiri atas tenaga sistem informasi Kesehatan, tenaga administasi keuangan, tenaga ketatausahaan dan pekarya.

Tabel 1.2
Ketersediaan SDM Kesehatan yang didayagunakan di Puskesmas

No	Instansi	Apoteker	Asisten Amnteker	Bidan	Dokter	Dokter Gigi	Epidemiolog	Fisioterapis	Nutrisionis	Penyuluh Kesmas	Perawat	Perawat Gigi	Perekam Medis	Pranata Lakkes	Sanitarian	jumlah
1	IF	3	2													5
2	Labkes				1									7		8
3	Poncol	1		3	2	1	1		1	1	3	3		1	1	18
4	Miroto		1	2	1	1			1	2	3	1	1	1	1	15
5	Bandarharjo	1	1	2	4	1	1		1		4	1	1	1		18

6	Bulu Lor		1	2	2	1	2		1		3	1	1	1	1	16
7	Halmahera	1	2	5	3	1			1		5	1	1	2		22
8	Bugangan	1	1	2	3	1			1		3			1	1	14
9	Karangdoro	1		6	2				1		3	1		2	1	17
10	Pandanaran	1	1	2	2	1	1	1	1		3	2	1	2	1	19
11	Lamper Tengah		1	2	3	1	1			1	2	1		1	1	14
12	Karangayu		1	2	2	1			1		1	1		1	2	12
13	Lebdosari		1	2	1	1	1		1	1	5	1		1	1	16
14	Manyaran		1	4	2	1			1	1	2	1	1	1	1	16
15	Krobokan		1	2	2					1	4	1		1		12
16	Ngemplak Simongan		1	2	2		1		1		1	1		1		10
17	Gayamsari		1	4	3	1	1		1		4	1		1	1	18
18	Candilama		1	2	2	1			1		3	1		1	1	13
19	Kagok		1	3	2	1			1	1	2	1		1	1	14
20	Pegandan		1	3	3	1	1		1		3	1	1	1	1	17
21	Genuk		2	3	2	1			1		4	1	1	1	1	17
22	Bangetayu	1	1	6	4	1	1		1		5	1		2	1	24
23	Tlogosari Wetan		2	5	2	1	1		1	1	3	3		1		20
24	Tlogosari Kulon	1	1	3	3	1	1		1		9	1		2	1	24
25	Kedungmundu		2	5	4		1		1		6	2		2	1	24
26	Rowosari	1	2	3	2	1	1		1	1	4	2		1	1	20
27	Ngesrep	1	1	7	2				1	1	4	2		1	1	21
28	Srondol	1	1	6	3	1	1		1		4	1		1	1	21
29	Padangsari	1		3	1	1			1		3	2		1	1	14
30	Pudakpayung		1	2	2	1			2	1	2	1		1	1	14
31	Gunungpati	1		7	3	1			2	1	6	1		1	1	24
32	Sekaran			3	1	1			1		3	1		1	1	12
33	Mijen	1	1	7	2	1	1		1		8	1		2		25
34	Karangmalang		1	2	1	1			1	1	7	1		1	1	17
35	Tambakaji		1	2	2	1					4	1		1	1	13
36	Purwoyoso		1	2	2	1			1		4	1		1	1	14

37	Ngaliyan	1		7	3	1			1	1	7			2		23
38	Mangkang		2	6	3	1			1		8			2	1	24
39	Karanganyar		1	2	1	1			1		4	1		1	1	13
	JUMLAH	18	39	131	85	32	17	1	36	15	149	43	8	53	31	658

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar SDM Kesehatan yang didayagunakan Puskesmas adalah jenis tenaga bidan, dokter dan perawat. Sembilan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan

Masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan komposisi jenis tenaga kesehatan merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan standar tenaga Kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes 75 tahun 2014.

Data SISDMK Badan PPSDM Kesehatan terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebanyak 3.965 dari 10.230 puskesmas (38,76%). Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2020-2024. Oleh karena itu kebijakan pembangunan Kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan melalu i peningkatan upaya promotive dan preventif. Dukungan dan inovasi serta pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mendatangkan Indonesia memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Arahan Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan sumber daya manusia dengan menjamin Kesehatan ibu hamil, Kesehatan bayi, Kesehatan balita, Kesehatan anak usia sekolah, penurunan sunting-kematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas Pendidikan, vokasi, membangun Lembaga manajemen talenta Indonesia dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

4. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan dukungan dari aspek SDM Kesehatan, program pembangunan sektor kesehatan di Kota Semarang telah mendapat dukungan dari aspek sarana dan prasarana. Aktiva atau yang biasa disebut aset adalah harta yang menjadi sumber ekonomi organisasi yang digunakan untuk kegiatan operasional organisasi. Aktiva terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional organisasi dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki sejumlah aset tetap. Berikut adalah daftar aset tetap dan aset lainnya yang di miliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Barang Ke Neraca per 31 Desember 2020

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	**97.522.627.242**
1.	Tanah	1.997.800.000
2.	Peralatan dan Mesin	47.777.637.142
3.	Gedung dan Bangunan	46.443.297.903
4.	Jalan, jaringan dan Irigasi	457.589.672
5.	Aset tetap lainnya	22.056.603
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	824.245.922
	ASET LAINNYA	**984.513.568**
1.	Aset tidak berwujud	698.601.968
2.	Asset lain-lain	285.911.600

Sumber data : Rekapitulasi Barang Ke Neraca Per 31 Des 2020

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 25 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian intergral dari pembangunan kota Semarang diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan Visi Dinas Kesehatan yang lebih menekankan pada upaya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. Visi ini dapat dicapai melalui proses pembangunan kesehatan yang berkesinambungan baik oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Pembangunan kesehatan tersebut diawali dengan suatu proses perencanaan untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Kota Semarang memiliki Visi dan Misi untuk perencanaan jangka panjang yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maupun jangka menengah Daerah (RPJMD), kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen periode satu tahun.

Sebagaimana tertuang di dalam Perubahan RPJMD periode 2016– 2021 Visi pembangunan Kota Semarang adalah "SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA".

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju masyarakat Semakin Sejahtera "di rumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik ;
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan ;
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif ;

Adapun pelaksanaan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang akan di jabarkan melalui Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu "*TERWUJUDNYA LIMA BESAR TERBAIK PELAYANAN KESEHATAN SE INDONESIA TAHUN 2021"*

Visi tersebut mengandung filosofi pokok yaitu Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatannya maka hasil yang akan dapat dicapai tidak maksimal.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan Misi Dinas kesehatan Kota Semarang adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Profesional , Handal Dan Berprestasi;
2. Meningkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Dengan Promosi Kesehatan;
3. Mengembangkan Kemitraan Dan Menggerakkan Masyarakat Untuk Hidup Sehat;
4. Mengembangkan Keunggulan Teknologi Informasi.

Pembangunan kesehatan di Kota Semarang, diarahkan untuk mendukung misi Walikota Semarang yang pertama, yaitu: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas.

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
3. Peningkatan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan
4. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai keempat misi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing–masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat perioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan lima tahun yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Perumusan tujuan ini merupakan salah satu tahapan perumusan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan Renstra.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan di bidang kesehatanpun menggunakanan prinsip yang sama. Rencana strategis pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program,dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi misi Dinas Kesehatan menjadi landasan pembuatan Renja

pada setiap tahunnya. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan yang ada. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021

Visi : Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Sasaran 1:** Meningkatnya promosi kesehatan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan	Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan	1. Peningkatan Promosi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat; 3. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
	Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	1. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
	Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Peningkatan pelayanan BLU 2. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 3. Peningkatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas 4. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat 5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 6. Peningkatan obat dan perbekalan kesehatan
	Sasaran 4 : Meningkatnya sumber daya dan informasi kesehatan	Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan	1. Peningkatan pembangunan meliputi informasi kesehatan 2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur

			3. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja keuangan 4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur

Tabel 2.2
Matriks Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target
Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/ sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Target Akhir Periode Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5					6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,21	77,22	77,23	77,24	77,25	77,26	77,26
1. Meningkatnya Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	1.1. Prosentase promosi kesehatan melalui media	Persen	80	90	90	100	100	100	100
	1.2. Prosentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen	50	55	60	70	80	85	85 %
	1.3. Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34
	1.4. Prosentase Puskesmas yang memiliki Gizi Center	Persen	0	40	60	80	100	100	100
	1.5. Jumlah kematian Ibu Maternal	Kasus	32	31	29	28	25	23	23
	1.6. Jumlah kematian Bayi	Kasus	201	197	193	189	185	181	181
2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak menular	2.1. Angka keberhasilan pengobatan TB BTA	Persen	84	85	86	88	89	90	90
	2.2. IR DBD	/100.000 pendduk	25,22	25	24	23	22	21	21
	2.3. Prosentase ODHA yang aktif minum ARV	Persen	40	45	50	55	65	75	75

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/ sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Target Akhir Periode Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5					6
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Jaminan Kesehatan	3.1. Persentase Respon Time Ambulan Hebat (Si Cepat) Layanan Kesehatan Sesuai SOP	Persen	0	0	40	60	80	100	100
	3.2. Prosentase Puskesmas Branding	Persen	10	20	40	60	80	100	100
	3.3. Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN KIS	Persen	58	75	85	100	100	100	100
	3.4. Persentase puskesmas yang sesuai standar permenkes no 75 th 2014	Persen	0	0	0	20	20	30	30
	3.5. Persentase puskesmas perspektif gender	Persen	10	20	40	50	60	75	75
	3.6. Persentase puskesmas yang terakreditasi	Persen	10	20	40	60	80	100	100
	3.7. Persentase penerapan penggunaan obat rasional	Persen	83,50	83,70	84,25	84,50	84,75	85	85
	3.8. Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	Persen	80	82	84	86	88	90	90
	3.9. Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas	Persen	72,97	75	78	81	84	85	85
4. Meningkatnya Sumber Daya dan Informasi Kesehatan	4.1 jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi	unit	1	5	5	10	15	20	20

Sumber data: Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2016-2021

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)		(4)
MISI. I MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS				
1	Meningkatnya Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	1	Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80%
		2	Jumlah Kematian Ibu Maternal	25 kasus
2	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + (%)	89%
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80%
		2	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	84%
4	Meningkatnya Sumber Daya dan Informasi Kesehatan (SDK)	1	Proporsi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai Standar	88%

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA				
1	Meningkatnya Promosi Kesehatan, Kesehatan	1	Prosentase Promosi Kesehatan Melalui Media	100 %
	Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	2	Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80 %
		3	Prosentase Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35 %
		4	Prosentase Puskesmas yang memiliki Gizi Center	10 %
		5	Jumlah Kematian Ibu Maternal	25 kasus
		6	Jumlah Kematian Bayi	185 kasus
2	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + (%)	89 %
	Menular dan Tidak Menular	2	Incidence Rate DBD	22 /100.000 penduduk
		3	Prosentase ODHA yang aktif minum ARV	65 %
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1	Presentase Respon Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan Ambulan Hebat/Si Cepat Sesuai SOP	80 %
		2	Prosentase Puskesmas Branding	80 %
		3	Cakupan Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam JKN-KIS	100 %
		4	Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014	20 %
		5	Persentase Puskesmas Perspektif Gender	60 %
		6	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80 %
		7	Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional	84,75 %
		8	Proporsi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai Standar	88 %
		9	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	84 %
4	Meningkatnya Sumber Daya dan Informasi Kesehatan	1	Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi	15 unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. LKj-IP Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020 menyajikan capaian setiap sasaran dan capaian kinerja kegiatan.

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance Plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2020 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui gap kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Skala Pengukuran Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria
1	91 keatas	Sangat Tinggi
2	76 – 90	Tinggi
3	66 – 75	Sedang
4	51 – 65	Rendah
5	Kurang 50	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bagian ini menguraikan capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan dalam satu analisis.

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ringkasan capaian kinerja pada indikator kinerja utama merupakan hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020				REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80 %	96%	120%	Sangat tinggi	96%
2	Jumlah Kematian Ibu Maternal	25 kasus	17 kasus	132%	Sangat tinggi	18 kasus
3	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + (%)	90 %	69%	76,66%	Tinggi	99,04%
4	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80 %	100%	125%	Sangat tinggi	100 %
5	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	90 %	29,72%	33,02%	Sangat rendag	29,7 %

Hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 seluruhnya telah melebihi target pada masing-masing indikator, dengan skala pengukuran realisasi kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi.

2. PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET PADA RENSTRA TH 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019 (%)
					TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA								
1	Meningkatnya Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	1	Prosentase Promosi Kesehatan Melalui Media	100	100	100	100%	100
		2	Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80	80	96	120%	96
		3	Prosentase Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35	0,35	0,35	100%	0,33
		4	Prosentase Puskesmas yang memiliki Gizi Center	100	100	100	100%	100
		5	Jumlah Kematian Ibu Maternal	25	25	17	132%	18
		6	Jumlah Kematian Bayi	185	185	145	121,62%	146
			Rata-rata capaian sasaran 1				112,27%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + (%)	90	90	69	76,66%	99,04
		2	Incidence Rate DBD /100.000 penduduk	22	22	19,20	112,72%	26,37
		3	Prosentase ODHA yang aktif minum ARV	65	65	55,40	85,23%	74,2
			Rata-rata capaian sasaran 2				91,53%	Sangat tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET PADA RENSTRA TH 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019 (%)
					TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1	Presentase Respon Time Ambulan Hebat (Si Cepat) Layanan Kesehatan Sesuai SOP	80	80	100	100%	100
		2	Prosentase Puskesmas Branding	80	80	80	100%	60
		3	Cakupan Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam JKN-KIS	100	100	94,44	94,44%	100
		4	Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014	20	20	77,75	388,75%	
		5	Persentase Puskesmas Perspektif Gender	60	60	68,18	113,63%	78,83
		6	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	80	80	100	125%	100
		7	Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional	84,75	84,75	86,10	101,59%	87%
		8	Proporsi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai Standar	88	88	88	100%	89,19%
		9	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	84	84	93	111,26%	92,73
			Rata-rata capaian sasaran 3				137,18%	Sangat tinggi
4	Meningkatnya Sumber Daya dan Informasi Kesehatan (SDK)	1	Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi	15	15	15	100%	15
			Rata-rata capaian sasaran 4				100%	Sangat tinggi
			Total rata-rata capaian sasaran				110,245%	Sangat Tinggi

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan, serta solusi dan rencana tindak lanjut yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

SASARAN I :

MENINGKATNYA PROMOSI KESEHATAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Untuk mencapai sasaran I dilakukan melalui strategi Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan meliputi program :

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

A. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 110 % dengan kategori predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1.	Prosentase promosi kesehatan melalui media	100	100	100	100%	100
2.	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	80	96	120%	96
	Rata-rata capaian sasaran				110%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Indikator kinerja prosentase promosi kesehatan melalui media dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%, atau berhasil mencapai 100%. Hal ini sama dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100 %. Sebanyak 37 puskesmas di Kota Semarang telah menggunakan media elektronik berupa TV dan radio untuk melakukan kegiatan penyuluhan .
2. Indikator kinerja prosentase rumah tangga PHBS dari yang di targetkan 80% menjadi 96%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 96 %

   Dalam proses pendataan PHBS telah berdasarkan *by name by address.* Pendataan PHBS dilakukan bekerjasama dengan PKK. Masing-masing puskesmas menggunakan pendataan PHBS

KEGIATAN YANG BERHASIL

1. Presentase promosi kesehatan melalui media realisasi di tahun 2020 sebesar 100%. Kegiatan promkes melalui media elektronik diwujudkan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat dengan berbagai tema kesehatan dan materi edukasi melalui radio. Penayangan iklan layanan masyarakat melalui video jaringan yang terdapat di setiap puskesmas di Kota Semarang dan dapat diakses pada website resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga pada media social berupa twitter, Instagram dan facebook;
2. Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukan kecenderungan peningkatan hal ini dapat dilihat indikator Persentase rumah tangga berperilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2018 sebesar 94,64%, tahun 2019 sebesar 96% dan realisasi di tahun 2020 tercapai sebesar 96%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan terlaksananya pembuatan media promosi,
2. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT oleh TP PKK kecamatan dan kelurahan dan terlaksananya pengelolaan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
3. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan target kinerja orientasi peningkatan peran generasi muda (SMA dan SMK) di bidang kesehatan dalam pencegahan penyakit (kesehatan reproduksi, KIA, peningkatan konsumsi Fe), orientasi anggota FKK dalam deteksi dini faktor resiko hamil risti, kematian ibu dan bayi dan 100 buruk, kegiatan saka bhakti husada dan orientasi anggota FKK di bidang kesehatan dalam Germas Hidup Sehat.
4. Kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dengan target kinerja sosialisasi Germas dan Pencegahan penyakit.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kemitraan dengan tujuan orientasi germas terhadap gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP).

B. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan 11 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,37% dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Tercapainya Swasti Saba Wistara	100	100	100	100%	100
2	Presentase kelurahan yang melaksanakan (STBM)	91	91	100	100%	100
3	Cakupan air bersih	94,6	94,6	98,95	104,6%	96
4	Kualitas air minum memenuhi syarat	86	86	99,87	116,12%	91,13
5	Kualitas air bersih memenuhi syarat	81	81	90	111,1%	88,92
6	Penduduk yang memanfaatkan jamban	96,4	96,4	100	103,73%	100
7	Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah	90	90	91	101,11%	91
8	Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan	93,2	93,2	93,5	100,32%	93
9	Tempat pengelolaan Pestisida sehat	98,8	98,8	100	101,2%	100
10	Institusi yang di bina	83,2	83,2	88,65	106,55%	88,57
11	Tempat Pengelolaan Makanan Sehat	83,2	83,2	86	103,36%	86
	Rata-rata capaian sasaran				104,37%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Sejak tahun 2019 seluruh kelurahan di Kota Semarang telah terverifikasi swastisaba wistara;
2. Cakupan air bersih dari target tahun 2020 sebesar 94,6% menjadi 98,95% realisasi tahun 2020. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 96%.
3. Kualitas air minum memenuhi syarat telah tercapai target 86% menjadi realisasi 99,87%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 91,13%.
4. Kualitas air bersih memenuhi syarat dari target 81% menjadi 90% realisasi tahun 2020. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 88,92%.

Presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat dengan target kinerja pemetaan kawasan kota sehat, verifikasi STBM, kajian kota sehat, penguatan kawasan kota sehat,
2. Kegiatan penyehatan lingkungan dengan pembangunan sarana IPAL untuk puskesmas, peningkatan inspeksi kualitas lingkungan dan inspeksi kualitas petugas, monitoring 5 pilar STBM.

C. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 115,21% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Prevalensi balita gizi buruk	0,35	0,35	0,35	100%	0,33
2	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	100	100	100	100%	100
3	Prersentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100%	100
4	Prevalensi balita stunting	<9,7	<9,7	3,13	167,7%	2,57
5	Bayi mendapat ASI Ekslusif	65,8	65,8	71,31	108,37%	69,39
	Rata-rata capaian sasaran				115,21%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dari hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu.

1. Realisasi capaian prevalensi status gizi buruk (BB/U) tahun 2020 mencapai 0,35% meningkat dari realisasi capaian tahun 2019 sebesar 0,33%

2. Capaian puskesmas yang memiliki gizi center telah mencapai 100% dari target 100%, sejak tahun 2019 seluruh Puskesmas di Kota Semarang telah memiliki kegiatan sebagai puskesmas gizi center dan semua puskesmas tersebut juga telah memiliki ruang konseling gizi dan ruang ASI.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program perbaikan gizi masyrakat dengan kegiatan :

1. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin,
2. Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya,
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

D. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan 10 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 105,2% dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Kematian Bayi	185	185	145	121,62%	146
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	92,1	92,1	93,91	102,00%	99,39
3	Cakupan Kunjungan Bayi	99	99	85,93	86,79%	100
4	Angka Kematian Balita (AKaBa)	7,81	7,81	7,01	110,24%	7,29
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	94,7	94,7	88,78	93,75%	100
6	Cakupan kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	94,8	94,8	99,59	105,05%	98,64
7	Cakupan Neonatal Komplikasi yang di tangani	77	77	100	129,87%	100

8	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SD	100	100	98,31	98,31%	100
9	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SMP	90	90	96,74	107,48%	100
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	97,81	97,81%	100
	Rata-rata capaian sasaran				105,2%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita pada tahun 2020 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan hamper seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehatan dari target tahun 2020 dengan rata-rata capaian kinerja 105,2%.

Capain kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program Pelayanan Kesehatan Anak Balita yaitu indikator cakupan pelayanan kesehatan balita belum berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja dari target 94,7% hanya berhasil mencapai realisasi 88,78%. Hal ini disebabkan pada masa pandemic terdapat pembatasan kegiatan dan masyarakat masih belum berani untuk beraktivitas diluar rumah.

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar sebesar 97,81% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena sekolah masih daring (BDR) pelaksanaan menggunakan google forms dan ada Sebagian datang ke puskesmas. Permasalahan belum tercapainya indicator ini karena:

a. Sekolah belum ada tatap muka, pelaksanaan ada sebagian dilakukan dengan pelaksanaan BIAS, tidak semua bisa datang ke puskesmas;
b. Sudah menggunakan online melalui google forms namun tidak semua bisa disebabkan Kendal jaringan internet, kuota dan wilayah.

E. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK.

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan 8 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102,95 dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Kematian Ibu Maternal	25	25	17	132%	18
2	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani	100	100	100	100%	100
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	99	99	100	101,01%	100
4	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,5	99,5	100	100,5%	100
5	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,5	99,5	100	100,5%	100
6	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99	99	100,2	101,03%	100
7	Puskesmas PONED	6	6	5	83,33%	5
8	Persalinan oleh Nakes di Faskes	95	95	100	105,26%	100
	Rata-rata capaian sasaran				102,95%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada tahun 2020 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehata dari target tahun 2020.

Capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu

a. Indicator cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin; dan
c. Cakupan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir berhasil meningkatkan.

Ketiga capaian indikator kinerja tersebut telah mencapai target 100%. Hal ini sama dengan rata-rata capaian SPM bidang Kesehatan terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak tahun 2019.

F. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran 1 yang dilakukan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 65,53% dengan kategori predikat “Rendah”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Kelompok usia lanjut aktif	95	95	46,71	49,17%	99,59
2	Persentase Posyandu Balita	90	90	46,71	51,9%	100
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	90	90	85,98	95,53%	100,49
	Rata-rata capaian sasaran				65,53%	Rendah

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pencapaian indicator kinerja program peningkatan pelayanan Kesehatan lansia seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan pelayanan Kesehatan lansia pada tahun 2020 adalah :

a. Jumlah kunjungan lansia di pelayanan Kesehatan 136.457 lansia;
b. Jumlah posyandu lansia yang aktif hanya 46,71%

Solusi atau tindak lanjut yang dilaksanakan adalah :

Strategi I : mensosialisasikan pendaftaran pelayanan kesehatan di puskesmas secara online bagi keluarga atau pendamping lansia;

Strategi II : mensosialisasikan pentingnya posyandu lansia dimasa pandemic guna memantau Kesehatan lansia;

Strategi III : meningkatkan kemampuan puskesmas dalam melaksanakan kegiatan homecare dan perawatan jangka Panjang bagi lansia;

Strategi IV : meningkatkan kemampuan kader dalam pembinaan lansia di rumah;

Strategi V : meningkatkan peran serta lansia dalam menunjang kegiatan lain (EO = program Kesehatan ibu, program ASI Ekslusif);

Strategi VI : meningkatkan Kerjasama dengan komda lansia terkait Kesehatan lansia masa adaptasi kebiasaan baru.

SASARAN II :

MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Untuk mencapai sasaran II dilakukan melalui strategi Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular meliputi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular

G. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR/ TIDAK MENULAR

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penykait menular dengan 25 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 105,59% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1.	Incident Rate (IR) , Demam Berdarah, Dengue (DBD)	22	22	19,20	112,72%	26,37
2.	Angka Bebas Jentik (ABJ)	88	88	92,4	105%	91,88
3	Kasus Demam Berdarah yang dilakukan PE ≤ 48 jam	68	68	100	147,05%	100
4	Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari	84	84	100	119,05%	100
5	Case Fatality Rate Demam Berdarah (CFR)	<1,5	<1,5	1,2	120%	3,18
6	Penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	100%	100
7	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80	80	61,26	76,58%	101,74
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	90	90	69	76,66	99,04
9	Penemuan penderita pneumonia balita (cakupan)	94	94	77,1	82,02%	74,2
10	Angka kematian Diare	<1	<1	0	100	1
11	Penderita yang selesai pengobatan Kusta (RFT)	83	83	100	120,48%	73,1
12	Persentase ODHA yang aktif minum ARV	65	65	55,40	85,23%	55,1
13	Cakupan kelurahan UCI(Universal Child Imunization)	100	100	98,7	98,7%	100
14	AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th	2	2	4	200%	9

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
15	Kelurahan mengalami KLB PD3I dan keracunan makanan yang ditangani < 24 jam	100	100	100	100%	100
16	Ketepatan laporan penyakit tidak menular	80	80	100	125%	100
17	Kelengkapan laporan penyakit tidak menular	90	90	100	111,1%	100
18	Cakupan BIAS	98,5	98,5	92,7	94,11%	98,8
19	Cakupan imunisasi CJH	100	100	100	100%	100
20	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB	100	100	79,18	79,18%	106,00
21	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	98,16	98,16%	103,8
22	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	83	83,00%	103,25
23	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	100	88,60	88,6%	97,51
24	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM	100	100	100	100%	100
25	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100%	119,70
	Rata-rata capaian sasaran				105,59%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 kinerja program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular memiliki 9 indikator capaian program yaitu

1. Angka keberhasilan pengobatan TB+
2. IR DBD
3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV
4. Cakupan pelayanan Kesehatan pada usia produktif
5. Cakupan pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi
6. Cakupan pelayanan Kesehatan penderita DM
7. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

8. Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan TB
9. Cakupan pelayanan Kesehatan dengan resiko terinfeksi HIV

Kesembilan indikator program tersebut terdapat 5 indikator yang belum memenuhi target kinerja tahun 2020.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit memiliki 9 indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan termasuk didalamnya 6 indikator SPM Bidang Kesehatan. Terdapat 6 indikator yang berhasil mencapai target tahun 2020 yaitu indikator kinerja :

1. Incident rate (IR) DBD dari target 22 per 100.000 penduduk tercapai 19,20 per 100.000 penduduk atau sebesar 112,72% capaian kinerja;
2. Penemuan dan penangganan penderita DBD dari target 100% yang ditetapkan telah tercapai 100% realisasi sama dengan capaian tahun 2019. Hal ini disebabkan karena semua kasus DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar;
3. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang merupan indikator SPM bidang kesehatan telah tercapai 100% dari target 100%;
4. Cakupan pelayanan Kesehatan pada penderita DM merupakan indikator SPM bidang kesehatan terealisasi 100%, dan
5. Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat juga merupakan indikator SPM bidang Kesehatan telah tercapai 100%.

SASARAN III :

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Untuk mencapai sasaran III dilakukan melalui strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan melalui program :

a. Peningkatan Pelayanan BLU;
b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
g. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

H. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Peningkatan Pelayanan BLU dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 111,26% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas	84	84	93	111,26	92,73
	Rata-rata capaian sasaran				111,26%	Sangat Tinggi

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase nilai kinerja BLUD puskesmas dari yang ditargetkan 84% menjadi 93 %, atau berhasil mencapai 111,26% %.

Hal ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 92,73%. persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas merupakan pencapaian seluruh puskesmas yang telah melaksanakan atau mengelola aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dari aspek keuangan, aspek kepatuhan pengelolaan keuangan dan aspek pelayanan

I. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 86% dengan kategori predikat “Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi	80	80	100	125%	100 %
2	Persentase puskesmas yang telah di reakreditasi	90	90	29,72	33,02%	29,7%
3	Pendampingan pasca akreditasi	100	100	100	100%	100%
	Rata-rata capaian sasaran				86%	Tinggi

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan kinerja program standarisasi pelayanan kesehatan. kinerja tahun 2020 sama dengan kinerja tahun 2019. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistem kesehatan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas;
3. Pendampingan Kegiatan akreditasi puskesmas.

Pada tahun 2020 kegiatan puskesmas yang di reakreditasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena adanya kebijakan dari Kementrian Kesehatan untuk melakukan *pending survey* reakreditasi dengan adanya pandemic covid-19.

J. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 216,7% dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase puskesmas perspektif Gender	60	60	68,18	113,63%	78,38
2	Pengembangan puskesmas perspektif gender	25	25	37	148%	20
3	Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	20	20	77,75	388,75%	
	Rata-rata capaian saaran				216,7%	Sangat Tinggi

Hasil kinerja tahun 2020 program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya seluruh indicator telah tercapai target tahun 2020. Indicator persentase puskesmas perfektif gender merupakan indicator yang baru di tetapkan pada tahun 2019, indicator ini diharapkan mampu mendukung kegiatan pengarusutamaan gender.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1). pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, (2). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu, (3). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas.

K. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 10 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,26% dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Respon Time Unit Reaksi Cepat Layanan kesehatan (Ambulan Hebat/	80	80	80	100%	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
	Si Cepat) sesuai SOP					
2	Persentase puskesmas Branding	80	80	80	100%	60
3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,28	0,28	0,22	79%	0,21
4	Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000 penduduk	30	30	22,22	74,06%	21
5	Rasio dokter per satuan Penduduk x 1.000	2,07	2,07	2,16	104,35	2,03
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1.000	2,45	2,45	2,96	120,82%	2,78
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk x 1000	0,02	0,02	0,02	100%	0,02
8	Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/ 1000 penduduk	2,25	2,25	2,91	129,33%	3,06
9	Cakupan puskesmas (%)	250	250	231,25	92,50%	231,25
10	Cakupan pembantu Puskesmas	23,2	23,2	21,46	92,5%	21,46
	Rata-rata capaian sasaran				99,26%	Sangat tinggi

Sumber data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai program upaya Kesehatan masyarakat hampir seluruhnya telah mencapai capaian kinerja 100%, dan terdapat 3 indikator yang belum memenuhi target. Hal ini rata-rata meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 5% dari realisasi tahun 2020.

Jumlah puskesmas branding pada tahun 2019 sebanyak 22 puskesmas, pada tahun 2020 terdapat penambahan 2 puskesmas branding yaitu:

1. Puskesmas Poncol dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
2. Puskesmas Miroto dengan RAMAH ANAK
3. Puskesmas Halmahera dengan program VCT Terpadu
4. Puskesmas Bugangan (TB)
5. Puskesmas Karangdoro program WUS, CATIN
6. Puskesmas Pandanaran : Fisioterapi

7. Puskesmas Lebdosari dengan program VCT Terpadu
8. Puskesmas Ngemplak Simongan : VCT Terpadu
9. Puskesmas Gayamsari : HATRA
10. Puskesmas Genuk : ANAK SEKOLAH
11. Puskesmas Bangetayu : PONED
12. Puskesmas Tlogosari Wetan : TUNTAS TB
13. Puskesmas Tlogosari Kulon (Kesehatan Tradisional)
14. Puskesmas Kedung Mundu : Akupuntur dan AKupresur
15. Puskesmas Ngesrep : PEDULI IBU DAN ANAK
16. Puskesmas Padangsari : SIK HOLISTIK
17. Puskesmas Srondol program TB
18. Puskesmas Gunungpati (Kesehatan Indra dan IPWL)
19. Puskesmas Mijen (Kesehatan Haji)
20. Puskesmas Karang Malang : SAYANG IBU
21. Puskesmas Purwoyoso
22. Puskesmas Mangkang dengan program Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tahun 2020

23. Puskesmas Bandarharjo : ODGJ
24. Puskesmas Karangayu : RAMAH DIFABLE

Terdapat 8 indikator kinerja dalam program upaya Kesehatan masyarakat yang telah memenuhi target kinerja yaitu (1) persentase respon time unit reaksi cepat layanan Kesehatan (ambulan hebat/si cepat) sesuai SOP; (2) persentase puskesmas branding; (3) rasio dokter per satuan penduduk; (4) rasio tenaga medis per satuan penduduk; (5) rasio rumah sakit persatuan penduduk; (6) rasio jumlah tempat tidur rumah sakit; dan (7) cakupan pembantu puskesmas.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistemkesehatan.
2. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan;
3. Kegiatan penyediaan dana kegiatan 37 puskesmas kota Semarang, instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan,
4. Kegiatan penyediaan dana bantuan operasional kesehatan 37 puskesmas
5. Pengeloaan bantuan operasional kesehatan
6. Kegiatan pelayanan kesehatan rujukan
7. Kegiatan pengembangan kemitraan

L. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,14% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan	100	100	100	100	95,80
3	Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN-KIS	100	100	94,44	94,44	100
	Rata-rata capaian sasaran				98,14%	Sangat tinggi

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan dari yang

ditargetkan 100% menjadi 100%. Pencapaian cakupan program jaminan kesehatan perlu penguatan dari kepesertaan pekerja penerima upah dan kepesertaan penduduk yang mampu untuk membayar iuran secara mandiri.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya .
2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan integrasi jamkesmaskot ke JKN-KIS dan kegiatan pendampingan jamkesmaskot di tahun 2020 berupa pembiayaan kesehatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di RSUD Kota Semarang.

M. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,53% dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Presentase penerapan penggunaan obat rasional	84,75	84,75	86,10	101,59%	87
2	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	88	88	88	100%	89,19
3	Ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100	100	100	100%	100
	Rata-rata capaian sasaran				100,53%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja program obat dan perbekalan kesehatan dari yang ditargetkan pada target 2020, atau berhasil mencapai persentase 100%. Meski demikian, hal ini menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya, rata- rata terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 1 (satu) persen dari realisasi tahun 2019.

Indikator kinerja presentase penerapan penggunaan obat rasional dan proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar merupakan indikator kinerja utama. Realisasi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 86,10% dan 88% berhasil mencapai 100% dari yang ditargetkan di tahun 2020. Namun hal ini menurun dibandingkan realisasi tahun 2019, sebesar 87% untuk indikator kinerja presentase penerapan penggunaan obat rasional dan 89,19% pada indikator proporsi pelayanan di puskesmas sesuai standar dengan rata-rata menurun realisasi capain kinerja 1,5%

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pendistribusian obat dan logistik,
2. Capaian program obat dan perbekalan kesehatan dengan tolak ukur kinerja persentase penerapan penggunaan obat rasional dan proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar dicapai dengan melakukan kegiatan :
    a. pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan output pemenuhan obat 37 puskesmas, sarana prasarana instalasi farmasi dan tersedianya obat dan reagen untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
    b. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit dengan tolak ukur kinerja pembinaan atau monitoring pelayanan kefarmasian di puskesmas, rumah sakit dan komunitas.

c. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan bertujuan tersedianya alat kesehatan di puskesmas, instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan.

N. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan melalui Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	90	90	90	100	89,07
2	Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan	93	93	93	100	100
	Rata-rata capaian sasaran				100%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase industri pangan yang menerapkan CPP PIRT dan persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sesuai dengan yang ditargetkan, atau berhasil mencapai 100%.

SASARAN IV :

MENINGKATNYA SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN

Untuk mencapai sasaran IV dilakukan melalui strategi Peningkatan Sumberdaya dan Informasi Kesehatan melalui program :

a. Program Informasi Kesehatan;

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O. PROGRAM INFORMASI KESEHATAN

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran meningkatnya sumber daya dan informasi kesehatan melalui Program Informasi Kesehatan dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 108,50% dengan kategori predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Rumah Sakit yang Terkoneksi	15	15	15	100	15
2	Database pelayanan kesehatan terpadu	5	5	5	100	11
3	Persentase ketersediaan data /Informasi Bidang Kesehatan akurat dan tepat waktu (profil)	90	90	90	100	90
4	Persentase Puskesmas yang mengisi data / informasi yang lengkap dan valid di Bank Data Kesehatan	100	100	100	100	100
5	Pengembangan system informasi kesehatan	4	4	6	150	5
6	Persentase Permasalahan sistem informasi yang selesai di tangani	95	95	96	101,05	95
	Rata-rata capaian sasaran				108,50%	Sangat Tinggi

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan indikator kinerja program informasi Kesehatan dengan kegiatan manajemen informasi Kesehatan. Target kinerja yang ingin dicapai

adalah jumlah rumah sakit yang terkoneksi, pemeliharaan system dan sarana SIK, desiminasi informasi Kesehatan melalui temu media wartawan/blogger.

Indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Pada tahun 2020, indikator ini sudah mencapai 15 rumah sakit yang terkoneksi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui Health Record Information System, atau sama dengan realisasi tahun 2019, yaitu sebanyak 15 rumah sakit. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik dengan Rumah Sakit. RS yang telah terkoneksi di tahun 2020 yaitu RS Kariadi, RSWN, RS Tugurejo, RS Sultan Agung, RS Panti Wilasa Dr Cipto, RSND, RS Panti wilasa Citarum, RS Elisabeth, RS Permata Medika, RSIA Bunda, RS Roemani, RS Banyumanik, RS Hermina Pandanaran dan RS Hermina Banyumanik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,serta solusi dan rencana tindak lanjut yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja organisasi ditahun berikutnya secara berkelanjutan.

1.TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pengelolaan Pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarag Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8), Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 69).

N0	Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	%
1	Hasil retribusi daerah	600.000.000	562.512.500	93,75
2	Lain-lain PAD yang sah	60.894.276.000	62.106.469.907	101,99
	TOTAL	**61.494.276.000**	**62.668.982.407**	**101,91**

2.ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan Kota Semarang tahun 2020 sebesar Rp 494.080.031.971,- dengan realisasi anggaran Rp 463.270.434.238 (93,76%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan TPP) Rp. 157.536.471.369 realisasi sebesar Rp.150.179.643.064,- atau (95,33%)
b. Belanja Langsung (Program) Rp. 336.543.560.602 realisasi sebesar Rp.313.090.791.175,- atau (93,03%)

ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN WAJIB KESEHATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	508.503.000	486.482.490	95,67
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.250.000	70.500.907	96,25
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	478.690.000	394.381.000	82,39
4	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	310.600.000	245.535.900	79,05

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.207.500	96,04
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.665.000	88,83
7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	2.719.869.000	1.603.840.632	62,64
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.029.662.900	854.785.493	83,02
9	Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	182.500.000	180.750.000	99,04
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	859.975.000	706.275.000	82,13
11	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	1.930.791.000	1.476.862.250	76,49
	TOTAL	**8.116.840.900**	**6.1414.286.172**	**75,66**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	870.460.000	845.724.258	97,16
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	706.110.000	492.252.500	69,71
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.554.000.000	1.520.980.941	97,88
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	556.822.000	510.391.200	91,66
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	220.000.000	208.890.000	94,95
	TOTAL	**3.907.392.000**	**3.578.238.899**	**91,58**

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE (%)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	291.080.000	278.950.000	95,83
2	Penilaian tenaga kesehatan teladan	10.000.000	9.850.000	98,5
	TOTAL	**301.080.000**	**288.800.000**	**95,92**

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE (%)
1	Penyusunan LKPJ SKPD	5.744.000	3.757.200	65,41
2	Penyusunan LAKIP	3.516.000	1.266.000	36,01
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.250.000	2.956.200	90,96
4	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.250.000	2.763.200	85,02
5	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.520.000	2.510.100	99,61
6	Penyusunan RENJA SKPD	5.982.000	2.382.000	39,82
7	Penyusunan RENSTRA SKPD	3.050.000	600.000	19,67
8	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	6.841.000	1.290.250	18,86
9	Penyusunan RKA SKPD dan DPASKPD	6.631.000	0	0
	JUMLAH	**40.784.000**	**17.524.950**	**42,97**

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	10.365.385.000	10.175.152.825	98,16
2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	145.119.000	135.767.175	93,56
3	Pengadaan alat alat kesehatan	7.067.994.730	6.740.267.952	95,36
	JUMLAH	**17.578.498.730**	**17.051.187.952**	**97**

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	104.006.000	104.006.000	100
2	Penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan	905.745.000	869.394.147	95,99
3	Kegiatan instalasi farmasi	828.000.000	808.394.147	97,62
4	Penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas poncol	582.235.000	582.235.000	100
5	Penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas miroto	433.176.000	433.176.000	100
6	Penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas bandarharjo	611.693.000	611.693.000	100
7	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas bulu lor	526.897.000	526.207.000	99,87
8	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas halmahera	451.029.000	451.029.000	100
9	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas bugangan	379.618.000	379.618.000	100
10	Penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas karangdoro	415.323.000	415.323.000	100
11	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas pandanaran	580.450.000	425.049.598	73,23
12	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas lamper tengah	361.766.000	351.059.451	97,04
13	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas karangayu	415.323.000	415.323.000	100
14	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas lebdosari	398.365.000	398.218.974	99,96
15	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas manyaran	390.331.000	390.331.000	100
16	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas krobokan	370.694.000	370.694.000	100

17	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas ngemplaksimongan	370.469.000	370.469.000	100
18	penyediaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas gayamsari	616.155.000	615.765.607	99,94
19	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candi Lama	424.247.000	424.247.000	100
20	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kagok	433.176.000	433.176.000	100
21	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegandan	584.942.000	584.942.000	100
22	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Genuk	558.135.000	557.959.068	99,97
23	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangetayu	602.765.000	602.765.000	100
24	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan	616.155.000	615.499.068	99,89
25	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon	629.545.000	629.545.000	100
26	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungmundu	709.876.000	709.658.287	99,97
27	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowosari	491.191.00	491.191.000	100
28	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngesrep	428.710.00	428.710.000	100
29	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padangsari	415.320.000	415.320.000	100
30	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srondol	442.100.000	441.028.000	99,76
31	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pudakpayung	400.185.000	400.185.000	100
32	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungpati	700.952.000	700.952.000	100
33	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mijen	571.524.000	571.524	100
34	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangmalang	361.770.000	342.432.051	94,65

35	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakaji	420.420.000	420.420.000	100
36	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwoyoso	400.185.000	400.185.000	100
37	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngaliyan	562.598.000	562.290.468	99,95
38	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkang	428.714.000	428.714.000	100
39	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar	373.430.000	373.430.000	100
40	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekaran	526.897.000	526.750.051	99,97
41	Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas	1.684.340.000	66.355.000	3,94
42	Pembiayaan dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan	1.022.302.000	945.181.569	92,46
43	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan	14.564.873.667	14.446.316.976	99,19
44	Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.050.829.000	7.701.556.817	95,66
45	Pendistribusian Obat dan Logistik	340.930.000	332.334.950	97,48
46	Pengembangan Kemitraan	80.803.000	80.803.000	100
JUMLAH		**45.568.189.667**	**43.151.305.227**	**94,7**

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
   Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	196.985.000	131.872.800	66,95
2	pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kemitraan	7.576.000	7.576.000	100
JUMLAH		**204.561.000**	**139.448.800**	**68,17**

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	pemberian tambahan makanan dan vitami	297.500.000	294.472.840	98,98
2	penanggulangan kurang energi protein (kep), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (gaky), kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizi mikrolainnya	238.925.000	238.685.000	99,9
3	pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	64.135.000	62.315.000	97,16
	JUMLAH	**600.560.000**	**595.472.840**	**99,15**

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE (%)
1	penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	1.056.186.000	967.145.645	91,57
2	penyehatan lingkungan	1.975.208.000	1.858.655.999	94,1
	JUMLAH	**3.031.394.000**	**2.825.801.644**	**93,22**

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	433.753.000	154.130.000	35,53
2	monitoring, evaluasi dan pelaporan	43.685.000	29.163.500	66,76
	JUMLAH	**477.438.000**	**183.293.500**	**38,39**

11. Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE (%)
1	Integrasi Jamkesmaskot ke JKN, KIS	150.208.773.032	137.617.634.000	91,62
2	Pendampingan jamkesmaskot	1.008.743.000	845.589.291	83,83
	JUMLAH	**151.217.516.032**	**138.463.223.291**	**91,57**

12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	4.620.090.000	4.152.628.800	89,88
2	rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu	1.260.864.370	1.235.355.000	97,98
3	rehabilitasi sedang / berat puskesmas	8.454.000.000	7.063.558.237	83,55
	JUMLAH	**14.774.954.370**	**12.880.167.787**	**87,18**

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	38.750.000	38.750.000	100
	JUMLAH	**38.750.000**	**38.750.000**	**100**

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	0	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**

15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	9.768.000	7.617.500	77,98
	JUMLAH	**9.768.000**	**7.617.500**	**77,98**

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB	4.430.915.000	4.412.175.000	99,58
2	Pembinaan Program Kesehatan IbuDan KB	113.990.000	113.990.000	100
	JUMLAH	**4.544.905.000**	**4.526.165.000**	**99,59**

17. Program Informasi Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Manajemen Informasi Kesehatan	2.517.403.000	2.416.131.547	95,98
	JUMLAH	**2.517.403.000**	**2.416.131.547**	**95,98**

18. Program Peningkatan Pelayanan BLU

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pelayanan BLU puskesmas poncol	1.300.000.000	1.283.105.789	98,70
2	pelayanan blu puskesmas miroto	1.130.090.066	1.075.288.571	95,15
3	pelayanan blu puskesmas bandarharjo	2.228.645.000	2.199.535.145	98,69
4	pelayanan blu puskesmas bulu lor	1.500.000.000	1.4947.765.808	99,65
5	pelayanan blu puskesmas halmahera	1.736.825.000	1.714.552.547	98,72
6	pelayanan blu puskesmas bugangan	846.626.495	846.249.990	99,96
7	pelayanan blu puskesmas karangdoro	1.900.000.000	1.896.963.658	99,84
8	pelayanan blu puskesmas pandanaran	1.992.535.000	1.940.766.560	97,40
9	pelayanan blu puskesmas lampertengah	1.068.580.100	1.058.153.041	99,02
10	pelayanan blu puskesmas karangayu	1.071.262.000	1.028.708.414	96,03
11	pelayanan blu puskesmas lebdosari	1.272.000.000	1.263.413.898	99,32
12	pelayanan blu puskesmas manyaran	1.081.648.176	1.063.044.450	98,28

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
13	pelayanan blu puskesmas krobokan	1.157.271.814	1.041.829.377	90,02
14	pelayanan blu puskesmas ngemplaksimongan	1.010.000.000	1.007.700.009	99,77
15	pelayanan blu puskesmas gayamsari	2.472.300.000	2.341.086.750	94,69
16	pelayanan blu puskesmas candi lama	1.843.505.651	1.485.622.655	80,59
17	pelayanan blu puskesmas kagok	1.500.000.000	1.401.803.125	93,45
18	pelayanan blu puskesmas pegandan	1.556.285.706	1.532.362.604	98,46
19	pelayanan blu puskesmas genuk	1.600.000.000	1.592.103.041	99,51
20	pelayanan blu puskesmas bangetayu	2.720.530.200	2.674.710.462	98,32
21	pelayanan blu puskesmas tlogosariwetan	2.534.842.957	2.400.384.971	94,70
22	pelayanan blu puskesmas tlogosari kulon	2.217.833.811	2.212.485.895	99,76
23	pelayanan blu puskesmas kedungmundu	3.099.051.330	3.007.993.958	97,06
24	pelayanan blu puskesmas rowosari	2.142.841.600	2.090.784.389	97,57
25	pelayanan blu puskesmas ngesrep	1.644.296.758	1.631.669.254	99,23
26	pelayanan blu puskesmas padangsari	1.619.000.000	1.569.812.996	96,96
27	pelayanan blu puskesmas srondol	1.310.000.000	1.278.093.289	97,56
28	pelayanan blu puskesmas pudakpayung	1.150.000.000	1.098.517.534	95,52
29	pelayanan blu puskesmas gunungpati	2.857.718.089	2.662.152.691	93,16
30	pelayanan blu puskesmas mijen	2.373.169.219	1.892.688.226	79,75
31	pelayanan blu puskesmas karangmalang	1.325.505.481	1.250.656.865	94,35
32	pelayanan blu puskesmas tambakaji	1.058.682.086	1.036.824.047	97,94
33	pelayanan blu puskesmas purwoyoso	902.363.418	814.855.649	90,30
34	pelayanan blu puskesmas ngaliyan	2.151.039.963	2.054.029.833	95,49
35	pelayanan blu puskesmas mangkang	1.329.325.983	1.286.084.119	96,75
36	pelayanan blu puskesmas karanganyar	720.500.000	719.044.718	99,80
37	pelayanan blu puskesmas sekaran	1.470.000.000	1.330.971.714	90,54
	JUMLAH	**60.894.275.903**	**58.278.816.312**	**95,70**

19. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	4.846.080.000	4.782.800.000	98,69
2	Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	17.367.905.000	17.241.151.374	99,27
3	Peningkatan imunisasi	102.620.000	99.138.000	96,61
4	P2 PTM	19.664.000	19.664.000	100
5	Operasional komisi penaggulangan aids kota semarang	148.531.000	145.186.379	97,75
6	Pelayanan pengendalian penyakit HIV AIDS DAN IMS	234.450.000	219.620.000	93,67
	JUMLAH	**22.719.250.000**	**22.507.559.753**	**99,07**

3.SISA LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN

Kebijakan SILPA pada tahun berjalan dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD. Bilamana menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, maka dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan. Dan bilamana SILPA tahun berjalan terjadi negatif,maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang bukan bersifat wajib pada program dan kegiatan yang tidak prioritas.

1. Pagu Anggaran Rp 336.543.560.602,-
2. Realisasi Belanja langsung Rp. 313.090.791.174 ,- -
3. **Surplus/defisit** **Rp. 23.452.769.428,-**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota Semarang Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, evaluasi dan analisis capaian kinerja telah dilakukan sebagai upaya perbaikan kedepan.
2. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut :

Visi : Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Sasaran 1:** Meningkatnya promosi kesehatan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan	1. Peningkatan Promosi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat; 3. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	110,00%	Sangat Tinggi
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	104,37%	Sangat Tinggi
	Program Perbaikan gizi Masyarakat	115,21%	Sangat Tinggi
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	105,20%	Sangat Tinggi
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	102,95%	Sangat Tinggi
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	65,53%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian sasaran	**100,54%**	**Sangat Tinggi**
	Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular	105,59%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian sasaran	**105,59**	**Sangat Tinggi**

	Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan kesehatan primer, rujukan dan jaminan kesehatan	1. Peningkatan pelayanan BLU 2. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 3. Peningkatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas 4. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat 5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 6. Peningkatan obat dan perbekalan kesehatan	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program Peningkatan Pelayanan BLU	111,26%	Sangat Tinggi
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	86,00%	Sangat Tinggi
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas	216,70%	Tinggi
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	99,26%	Sangat Tinggi
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	98,14%	Sangat Tinggi
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	100,53%	Sangat Tinggi
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian sasaran	**115,98%**	**Sangat Tinggi**
	Sasaran 4 : Meningkatnya sumber daya dan informasi kesehatan	1. Peningkatan pembangunan meliputi informasi kesehatan 2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur 3. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja keuangan 4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program Informasi kesehatan	108,50%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian sasaran	**108,50%**	**Sangat Tinggi**

Dengan hasil tersebut diatas, Kinerja Pemerintah Kota Semarang Urusan Kesehatan pada Tahun 2020 dapat nilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata,namun juga merupakan sinergitas, kerjasama dan harmonisasi dengan semua elemen.

B. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

1. Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pembenahan pada segala lini dan bidang untuk pencapaian kinerjas secara maksimal.
2. Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain sebagai bahan pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG

dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, SP.Pd